

**PENGARUH ASET DAERAH, PAD, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016 )**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:  
NIKEN KUSUMA WARDANI  
B200140278**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“ PENGARUH ASET DAERAH, PAD, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA”  
(Studi Empiris pada kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2014-2016)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**NIKEN KUSUMA WARDANI**

**B 200 140 278**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Triyono, SE, M.Si**  
**NIDN. 0627016801**

## HALAMAN PENGESAHAN

**“PENGARUH ASET DAERAH,PAD, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA”  
( Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa  
Tengah)**

Yang ditulis oleh:

**NIKEN KUSUMA WARDANI**

**B 200 140 278**

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Hari Senin, 13 Agustus 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Triyono,SE, M.Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Rina Trisnawati., M.Si,Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji )
3. Dr. Noer Sasongko, SE.,M.Si.,Ak  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Syamsudin, S.E., M.M.)**

**NIDN. 0017025701**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Oktober 2018

Penulis



**NIKEN KUSUMA WARDANI**  
**B200140278**

**PENGARUH ASET DAERAH, PAD, DANA PERIMBANGAN, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi  
Jawa Tengah Tahun 2014-2016 )**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aset daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota provinsi jawa tengah tahun 2014-2016. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota provinsi jawa tengah. sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dengan 3 tahun pengamatan, maka total sampel yang diteliti sebanyak 105 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan aset daerah, dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

**Kata kunci :** Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, indeks pembangunan manusia

**Abstract**

The purpose of this study was to determine the effect of regional assets, PAD, balancing funds, and capital expenditure on the human development index of the regencies and cities of Central Java province in 2014-2016. Population and sample in this research is district and city of central java province. the sample in this study uses a sampling technique saturated with 3 years of observation, then the total sample studied was 105 samples. Data analysis method used in this study is multiple linear regression to test and prove the research hypothesis. The results of the analysis show that PAD affects the human development index. Regional assets, equity funds, and capital expenditures have no effect on the human development index.

**Keywords:** Regional Asset, PAD, Balancing Fund, and Capital Expenditure, human development index

**1. PENDAHULUAN**

Kualitas manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Dalam publikasinya, Badan Pusat Statistik telah merubah beberapa indikator yang sudah tidak tepat lagi untuk digunakan

dalam penghitungan IPM, yaitu Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik, sehingga diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nur Isa Pratowo (2011) yang menjelaskan bahwa, dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja agar lebih terfokus pada program sasaran dan memperkecil belanja yang berupa upah/ gaji/honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimaksud di bidang kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja serta memperluas pasar produk-produk regional agar meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak.

UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga terdapat sumber lain berupa pinjaman daerah. Pemerintah daerah dapat menciptakan sumber pendapatan dengan cara melakukan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang saat ini dikategorikan masih belum optimal serta mengevaluasi ketidakefisienan yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Karakteristik pengelolaan sumber daya keuangan dapat digambarkan dalam pengelolaan aset yang tersaji dalam neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi daerah seharusnya merupakan basis utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin berkurang dan pada akhirnya daerah memiliki kekuatan dalam memenuhi segala kebutuhannya terkait dengan prosedur pelayanan publik. Sedangkan menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ida, et al., 2018) dan (edi Yanto, dkk 2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berbeda dengan penelitian Anggraini dan Sutaryo (2015) membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan digunakan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Tumpal Manik (2013) melakukan penelitian dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. berbeda dengan penelitian Anim dan Imanda ( 2018)

yang menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan kepada kelompok belanja administrasi umum (Halim; 2004). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Yanto dkk (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia telah dilakukan peneliti terdahulu, diantaranya yaitu Tumpal Manik (2013), Edi Yanto, dkk (2018), Anim dan Imanda (2018). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), dan belanja modal. Dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu aset daerah.

## **2. METODE**

Desain Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan indeks pembangunan manusia kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2014 sampai 2016 yang berjumlah 35 terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel penelitian sebanyak 35 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014-2016. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan indeks pembangunan manusia Kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2014 -2016 yang diperoleh dari badan pemeriksa keuangan perwakilan



provinsi Jawa Tengah dan indeks pembangunan manusia diperoleh dari website BPS Jawa Tengah.

Variabel Independen terdiri dari Aset Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Belanja Modal sedangkan variabel dependen terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari analisis deskripsi, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji Multikolinearitas, Uji Autokolerasi, Uji Heteroskedastisitas), uji hipotesis (Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F), Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Populasi dalam penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota sehingga diperoleh sampel 105 (35 x 3). Objek penelitiannya adalah aset daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan belanja modal kabupaten dan kota yang diperoleh dari badan pemeriksa keuangan perwakilan Jawa Tengah.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AD	105	28,00	30,99	28,7350	0,47311
PAD	105	8,32	36,35	15,7130	5,48874
DP	105	14,00	86,53	60,8647	8,65709
BM	105	4,95	36,03	19,0690	5,58672
IPM	105	54,19	72,49	62,1427	4,12363
Valid N (listwise)	105				

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Hasil uji statistik diatas dapat dilihat jumlah sampel (N) 105. Hasil dari perhitungan output SPSS menunjukkan Aset daerah nilai terkecil atau minimum 28,00 dan nilai terbesar atau maximum 30,99. rata-rata total aset daerah yang dimiliki kabupaten dan kota di Jawa Tengah selama 3 tahun sebesar 28,7350.

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah nilai terkecil atau minimum 8,32 dan nilai

terbesar atau maximum yaitu 36,35. Rata-rata total pendapatan asli daerah selama 3 tahun 15,7130 sedangkan standar deviasi 5,48874.

Dana perimbangan menunjukkan bahwa nilai dana perimbangan yang terkecil atau minimum 14,00 dan nilai terbesar atau maximum yaitu 86,53 sedangkan standar deviasi 8,65709.

Berdasarkan hasil uji statistik tabel 1 dapat dilihat nilai terkecil atau minimum belanja modal 4,95. Dan nilai terbesar atau maximum 36,03 rata-rata belanja modal 19,0690 sedangkan standar deviasinya 5,58672.

Indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai terkecil atau minimum 54,19 dan nilai terbesar atau maximum 72,49 rata-rata indeks pembangunan manusia 62,1427 sedangkan standar deviasinya 4,12363.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	P-value	Keterangan
Unstandardized residual	0,545	Data Terdistribusi Normal

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Pada tabel 2 menunjukkan nilai 0,799 dengan nilai signifikansi diatas 0,05. Dalam pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi  $0,545 > 0,05$ . Dengan demikian data dinyatakan terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
AD	0,715	1,398	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	0,736	1,358	Tidak terjadi multikolinearitas
DP	0,815	1,228	Tidak terjadi multikolinearitas
BM	0,901	1,110	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 3 semua variabel mempunyai nilai tolerance  $> 0,10$  dan semua variabel mempunyai nilai  $VIF < 10$  sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-watson
1	0,688 <sup>a</sup>	0,473	0,452	3,05368	1,474

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4 nilai DW 1,474 berada diantara -2 dan + 2 sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model regresi tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	A	Kesimpulan
AD	0,679	0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
PAD	0,683	0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
DP	0,643	0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas
BM	0,920	0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 5 hasil pengujian heterokedastisitas dapat diketahui nilai sig lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Koefisien	T hitung	Sig	Keterangan
(constant)	26,262	1,218	0,226	
AD	0,935	1,250	0,214	Tidak Berpengaruh
PAD	0,469	7,375	0,000	Berpengaruh
DP	0,010	0,269	0,789	Tidak Berpengaruh
BM	0,053	0,56	0,352	Tidak Berpengaruh
R <sup>2</sup>	0,473			
Adjusted R <sup>2</sup>	0,452			
F Hitung	22,412			
Sig	0,000			

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2018

Dari tabel 6 dapat dibuat regresi sebagai berikut :  $IPM = 25,622 + 0,935AD + 0,469PAD + 0,10DP + 0,53BM$ .

Koefisien constanta memiliki nilai 26,262 berarti ketika aset daerah, PAD, dana perimbangan, dan belanja modal tidak ada atau bernilai 0 maka indeks pembangunan manusia tetap 26,262. Koefisien variabel aset daerah 0,935 ini berarti apabila variabel aset daerah naik 1, maka variabel indeks pembangunan manusia akan naik 0,935. Koefisien variabel PAD 0,469 hal ini berarti apabila variabel PAD naik 1, maka variabel indeks pembangunan manusia akan naik 0,469. Koefisien variabel dana perimbangan 0,010 hal ini berarti apabila variabel dana perimbangan naik 1, maka variabel indeks pembangunan manusia akan

naik 0,010. Koefisien variabel belanja modal 0,053. hal ini berarti apabila variabel belanja modal naik 1 maka variabel indeks pembangunan manusia akan naik 0,053.

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai R Square 0,473. Ini berarti hanya 47,3 persen peningkatan IPM dapat dilihat dari pengaruh yang disebabkan oleh variabel aset daerah, PAD, dana perimbangan dan belanja modal. Sisanya 52,7 persen disebabkan faktor yang lain.

Dalam tabel 6 diketahui bahwa Nilai  $F_{hitung}$  22,412 Sedangkan  $F_{tabel}$  2,46. Sehingga  $22,412 > 2,46$   $H_0$  ditolak. Jadi disimpulkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sehingga ada pengaruh secara signifikan antara variabel aset daerah, PAD, dana perimbangan, belanja modal dengan variabel Indeks pembangunan manusia. Dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  dalam uji F dapat disimpulkan variabel aset daerah, PAD, dana perimbangan, Belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh  $T_{hitung}$  1,250 yang nilainya kurang dari  $T_{tabel}$  1,983 dan nilai sig lebih besar dari 0,05 atau  $0,214 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak  $H_0$  diterima. Sehingga disimpulkan aset daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh  $T_{hitung}$  7,375 yang nilainya lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,983 dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_1$  diterima  $H_0$  ditolak. Sehingga disimpulkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas (2018)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh  $T_{hitung}$  0,269 yang nilainya kurang dari  $T_{tabel}$  1,983 dengan nilai sig lebih besar dari 0,05 atau  $0,789 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak  $H_0$  diterima. Sehingga disimpulkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anim Rahmayati dan Imanda Firmantyas (2018).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh  $T_{hitung}$  0,935 yang nilainya kurang dari  $T_{tabel}$  1,983 dengan nilai sig lebih besar dari 0,05 atau  $0,352 > 0,05$ , maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga disimpulkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Asepma (2018).

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t tabel 6 aset daerah memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,250 yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,983 dengan nilai sig  $0,214 > 0,05$  yang berarti pada daerah penerimaan  $H_0$ , sehingga ditarik kesimpulan  $H_1$  ditolak. Sehingga aset daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Aset daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia karena Aset daerah hingga saat ini masih ada yang belum terselesaikan diantaranya mulai dari proses perencanaan yang belum berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah, penilaian barang milik daerah yang belum tuntas disebabkan barang yang diusulkan tidak keseluruhan dinilai, penghapusan yang masih menunggu regulasi, pengamanan barang milik daerah yang belum seluruhnya didukung bukti kepemilikan serta masih lemahnya pengawasan. Sehingga aset daerah belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian sesuai dengan Renas (2014) memperoleh hasil aset daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana kinerja keuangan diproksikan dengan IPM. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Irfan (2015) memperoleh hasil aset daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih (2015) menyatakan bahwa total aset berpengaruh terhadap kinerja pemerintah yang diproksikan dengan IPM.

Berdasarkan hasil uji t di tabel 6 diketahui nilai  $t_{hitung}$  PAD 7,375 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,983 dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$  yang berarti pada daerah penolakan  $H_0$ , sehingga ditarik kesimpulan  $H_2$  diterima. Dengan demikian PAD berpengaruh signifikan terhadap indeks

pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD sangat berperan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia pada tiap kabupaten dan kota. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum. PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat membangun daerahnya termasuk kualitas hidup masyarakat di daerah yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM).

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2018), yang menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. penelitian yang dilakukan oleh Edi, Ridwan, Vitayanti (2018) juga menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Ayu, Supadmi (2018) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil analisis uji t dana perimbangan memiliki  $t_{hitung}$  0,269 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi  $0,789 > 0,05$ , artinya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Tidak adanya pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Sehingga masing-masing dana tersebut memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Dana alokasi umum digunakan untuk memenuhi alokasi dasar dalam suatu pemerintah daerah dimana alokasi dasar merupakan alokasi

anggaran untuk belanja pegawai bukan belanja modal. Seharusnya dana alokasi umum lebih dialokasikan untuk belanja modal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pengalokasian Dana alokasi khusus per bidang di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Peneliti tidak dapat mengetahui secara rinci sarana dan prasarana apa saja yang dibangun pemerintah yang menggunakan dana alokasi khusus dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selain itu terdapat perbedaan dana alokasi khusus untuk masing-masing kabupaten dan kota. Sedangkan pengelolaan dan penggunaan dana bagi hasil merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan dana bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian dana bagi hasil kurang berdampak secara signifikan pada indeks pembangunan manusia. Sehingga dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anim (2018) yang menunjukkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Riva (2017) juga menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil analisis uji t belanja modal memiliki  $t_{hitung}$  0,935 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi  $0,352 > 0,05$ , artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, dengan demikian hipotesis keempat ditolak. Keadaan ini memberikan indikasi bahwa belanja modal tidak memiliki kontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui IPM. Tidak adanya pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena masih rendahnya jumlah belanja modal yang

dialokasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian belanja modal belum dilaksanakan secara tepat sasaran. pengalokasian belanja modal pada urusan pemerintah yang tidak terkait dengan masyarakat seperti pengadaan rumah dinas, pengadaan kendaraan dinas, dan pembangunan gedung pemerintahan yang berlebihan turut menjadi faktornya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyu (2014) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan Agung (2016) juga menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Edi Yanto, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh aset daerah, pad, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aset daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  1,250 <  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi 0,214 > 0,05

PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  7,375 >  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  0,269 <  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi 0,789 > 0,05.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal ini terbukti nilai  $t_{hitung}$  0,935 <  $t_{tabel}$  1,983 dan nilai signifikansi 0,352 > 0,05.



## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran sebagai berikut:

Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel dan periode pengamatan yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia sehingga diperoleh hasil yang berbeda.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup wilayah penelitian karena masih banyak kabupaten dan kota di daerah lain untuk dijadikan objek penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, T dan Sutaryo. (2015). *Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah Provinsi di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015. 2302--8556.
- Badan Pusat Statistik. 2018. IPM 2010-2016, (Online), (<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 23 Mei 2018).
- Fattah Vitayanti, Ridwan, Edi. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018 hlm 125-135 ISSN: 2302-2019.
- Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, Ubar. 2017. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/kota Propinsi Sumatera Utara*. Volume 1.No. 1 januari – Juni 2017.
- Manik, Tumpal. 2013. *Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue, Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal organisasional dan manajemen. Volume 9, nomor 2,, september 2013.107-124.
- Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Padang.

- Mengkunegara, Irfan. 2015. *Pengaruh Karakteristik Keuangan Dan Hasil Pemeriksaan Pada kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara*.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prihastuti, Hygi. 2018. *Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di kabupaten/ Kota Riau*. Menara ekonomi. Volume IV No. 1- April 2018 ISSN: 2407-8565;E-ISSN: 2579-5295.
- Putra, P.G.M. dan Ulupi, I.G.K.A. (2015). *Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3: 836-877.
- Rahmayanti Anim, dan Pertiwi Putri. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. and Accounting Vol. 1 No. 1 Januari-Mei 2018 pp: 45-62.
- Sarkoro, Hastu. 2016. *Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Riset akuntansi dan keuangan indonesia ,1 (1), 2016.
- Setyowati, L dan Suparwati, Y.K. (2012). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan, dan, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening*. Prestasi. Vol.9 No.1.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung:Alfabeta.
- Supadmi dan Dewi. 2016. *Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks pembangunan manusia*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14.1. Januari (2016). Hal : 695-722.
- Supadmi, Sari Yunita. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia*.E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15.3. Juni(2016): ISSN 2302-8556.
- Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yanto Edi, Ridwan, Dan Fattah Vitayanti. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. E-jurnal Katalogis, Vol 6 Nomor 2 Februari 2018. ISSN 2302 – 2019.